



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.HH-47.KP.03.03 TAHUN 2022

TENTANG

**PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil rapat Tim Penilai Kinerja I tanggal 24 Agustus 2022 dan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/351/S.SM.02.00/2022 tanggal 22 Juni 2022, Nomor B/465/S.SM.02.00/2022 tanggal 2 Agustus 2022 dan Nomor B/484/S.SM.02.00/2022 tanggal 14 September 2022 tentang Tanggapan atas Permohonan Pertimbangan Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu melakukan pemberhentian dari jabatan administrasi dan pengangkatan dalam jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
 5. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi Yang Terdampak Penataan Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

KESATU: . . .

- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diberhentikan dari jabatan lamanya sebagaimana tersebut dalam lajur 4, diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, diberikan angka kredit sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 6, dan mendapat tambahan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 7 daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan akan dibayarkan tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Biaya perjalanan ke tempat tugas yang baru ditanggung oleh negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KELIMA** : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 November 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



YASONNA H. LAOLY

Tembusan:

1. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan;
5. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
6. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual;
7. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia;
8. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional;
9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11. Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
13. Pembuat daftar gaji yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI

NOMOR : M.HH-47.KP.03.03 TAHUN 2022

TANGGAL : 04 November 2022

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT	TAMBAHAN TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
1.	SUMARSONO, S.H., M.Si. NIP. 197301091993031001	Pembina Tk. I (IV/b)	Analisis Hukum Ahli Madya pada Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	Analisis Kepegawaian Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	550	Koordinator Kepegawaian pada Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
2.	SUSAN SANDRA INDRIATI, S.T., M.T.I. NIP. 198212182009122004	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	Pranata Komputer Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	100	Koordinator Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Direktorat Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
3.	IRMA SURYANTI, S.E., M.Si. NIP. 196510051992022001	Pembina Tk. I (IV/b)	Analisis Kepegawaian Ahli Madya, Koordinator Sistem Informasi, Manajemen dan Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Penerjemah Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	550	Koordinator Penerjemahan Peraturan Perundang-Undangan pada Direktorat Pengundangan, Penerjemahan dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

1	2	3	4	5	6	7
4.	RATIH SRI MARTANI, S.E., S.H., M.Si. NIP. 197005031994032001	Pembina Tk. I (IV/b)	Penerjemah Ahli Madya, Koordinator Penerjemahan Peraturan Perundang- Undangan pada Direktorat Pengundangan, Penerjemahan dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Analisis Kepegawaian Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	550	Koordinator Sistem Informasi, Manajemen dan Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang- Undangan pada Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang- Undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang- Undangan
5.	CATURWATI, S.Sos. NIP. 196512091986032001	Pembina (IV/a)	Kepala Bagian Program dan Pelaporan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia	Penyuluh Hukum Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia	512,5	Koordinator Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia Wilayah II pada Direktorat Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia
6.	MARCHIENDA WERDANY, S.T. NIP. 198103112003122001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Analisis Kebijakan Ahli Madya, Koordinator Indikasi Geografis pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	550	Koordinator Kerja Sama Luar Negeri pada Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
7.	IRMA MARIANA, S.T., M.Si. NIP. 198006292006042002	Pembina (IV/a)	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya, Koordinator Tata Usaha dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	400	Koordinator Indikasi Geografis pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
8.	SETYO PURWANTORO, S.T., M.Si. NIP. 197510232000031001	Pembina (IV/a)	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Subkoordinator Penelusuran Paten pada Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Pranata Komputer Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	100	Koordinator Perencanaan pada Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

1	2	3	4	5	6	7
9.	SITI OPIH MUHAPILAH, S.H. NIP. 198104092005012001	Pembina (IV/a)	Analisis Kepegawaian Ahli Muda, Subkoordinator Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang- Undangan pada Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang- Undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang- Undangan	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang- Undangan	300	Subkoordinator Pengundangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Direktorat Pengundangan, Penerjemahan dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
10.	SHINTO SURYOWATI, S.H., M.H. NIP. 197805092005012001	Pembina (IV/a)	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Subkoordinator Pengundangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Direktorat Pengundangan, Penerjemahan dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang- Undangan	300	Subkoordinator Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang- Undangan pada Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang- Undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang- Undangan
11.	DANANG DIANTO, S.H.,M.H. NIP. 198908042012121001	Penata (III/c)	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, Subkoordinator Akuntansi dan Pelaporan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	225	Subkoordinator Kerja Sama Organisasi Internasional pada Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

1	2	3	4	5	6	7
12.	BAYU SANTOSO, S.H. NIP. 198906152012121001	Penata (III/c)	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Subkoordinator Peraturan Perundang-Undangan, Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	250	Subkoordinator Akuntansi dan Pelaporan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
13.	BAYU HARDIYUDANTO, S.H., M.H. NIP. 198612152012121001	Penata (III/c)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda, Subkoordinator Pengelolaan Barang Milik Negara pada Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	250	Subkoordinator Peraturan Perundang-Undangan, Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
14.	IDRIS YUSHARDY, S.H. NIP. 198311202010121007	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol pada Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Arsiparis Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	100	Subkoordinator Pemberdayaan Potensi Kekayaan Intelektual pada Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
15.	MUHAMMAD INSAN KAMIL, S.Kom., M.H. NIP. 197801262005011001	Pembina (IV/a)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda, Subkoordinator Layanan Pengadaan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	300	Subkoordinator Klasifikasi dan Publikasi pada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
16.	SUPRAPTO, S.I.P., M.H. NIP. 196802031993031001	Pembina (IV/a)	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Subkoordinator Klasifikasi dan Publikasi pada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	100	Subkoordinator Layanan Pengadaan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
17.	DIYAH PRAMUSARI, S.E., S.H., M.B.A. NIP. 198401142009122004	Penata Tk. I (III/d)	Analisis Anggaran Ahli Muda, Subkoordinator Penyusunan Rencana dan Anggaran pada Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia	Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	300	Subkoordinator Umum Kepegawaian pada Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

1	2	3	4	5	6	7
18.	EKA KURNIAWAN, S.E. NIP. 198701172010121003	Penata (III/c)	Kepala Subbagian Rumah Tangga pada Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Analisis Anggaran Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia	275	Subkoordinator Penyusunan Rencana dan Anggaran pada Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

YASONNA H. LAOLY

